

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kehidupan modern tidak terlepas dari berbagai macam makanan olahan salah satunya adalah cokelat. Cokelat dihasilkan dari biji buah kakao yang telah mengalami beberapa proses pengolahan sehingga menjadi makanan cokelat. Indonesia merupakan negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia setelah Ghana dan Pantai Gading, dan komoditas ini memiliki peranan penting dalam perekonomian rakyat karena merupakan lapangan kerja bagi kurang lebih 900.000 keluarga petani kakao Indonesia. Selain itu komoditas ini juga merupakan penghasil devisa terbesar dari sektor perkebunan setelah kelapa sawit dan karet, dan perkebunan kakao berperan dalam mendorong pengembangan wilayah dan agroindustri.

Sebagai negara penghasil biji kakao terbesar ketiga di dunia, industri pengolahan kakao di Indonesia tidak berkembang jika dibandingkan negara lain. Beberapa permasalahan melatarbelakangi hal tersebut, antara lain penerapan kebijakan PPN oleh pemerintah melalui UU No.18/2000 terhadap komoditas biji kakao dan komoditas perkebunan lainnya. Setelah kebijakan tersebut diterapkan industri pengolahan kakao Indonesia mengalami masa-masa sulit. Industri dalam negeri mengalami kekurangan pasokan bahan baku, utilisasi kapasitas pabrik tidak maksimal. Kelangkaan tersebut juga didorong oleh harga biji kakao internasional yang tinggi sehingga menyebabkan disparitas harga dengan harga biji kakao lokal, oleh karena itu para pedagang lebih suka untuk menjual biji kakao keluar negeri selain itu tidak ada hambatan untuk melakukan ekspor seperti pajak ekspor.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian mengenai pengaruh kebijakan PPN dan faktor-faktor lain terhadap probabilita perusahaan bertahan. Terdapat beberapa temuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- Kebijakan PPN terbukti signifikan berpengaruh negatif terhadap probabilita perusahaan bertahan dalam industri pengolahan kakao. Kebijakan ini telah menyebabkan beberapa perusahaan di industri

pengolahan kakao mati/tutup, dan industri ini tidak berkembang. Kebijakan ini hanya akan menghambat perkembangan industri pengolahan kakao, dan kerugian akibat dari terhambatnya industri ini tidak sepadan dengan penerimaan negara yang diterima dari PPN. Produksi biji kakao yang melimpah seharusnya menjadikan industri pengolahan kakao Indonesia berkembang pesat karena memiliki akses terhadap bahan baku.

- Sesuai dengan teori Evans (1987) bahwa ukuran dan umur perusahaan meningkatkan probabilitas perusahaan bertahan terbukti dalam penelitian ini. Variabel *age* dan *worker* (sebagai *proxy* dari ukuran perusahaan) terbukti secara umum signifikan mempengaruhi probabilitas perusahaan bertahan dalam industri pengolahan kakao. Peningkatan umur perusahaan merupakan salah satu faktor penting bagi perusahaan untuk dapat bertahan karena umur perusahaan mencerminkan pengalaman dari sebuah perusahaan. Semakin lama perusahaan itu berdiri maka kemampuan untuk menghadapi perubahan-perubahan dalam pasar lebih baik dan sudah relatif teruji terhadap perusahaan baru. Ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi probabilitas perusahaan bertahan menggambarkan bahwa perusahaan besar memiliki permodalan lebih baik dan skala ekonomi sehingga cenderung lebih tahan terhadap gejolak pasar dan hambatan-hambatan industri lainnya.
- Penelitian ini menemukan bahwa produktivitas perusahaan signifikan berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan bertahan. Hal ini bertolak belakang dengan penemuan dari Bernard (2003) yang mengatakan probabilitas perusahaan mati/tutup meningkat pada perusahaan dengan produktivitas rendah dan pada perusahaan yang tidak terhubung dengan pasar ekspor. Pada industri pengolahan kakao nilai produktivitas perusahaan-perusahaannya relatif sama, hal ini disebabkan oleh tingkat utilisasi kapasitas pabrik yang masih rendah dari kapasitas maksimalnya, sehingga skala ekonomi tidak tercapai. Dengan demikian variabel produktivitas pada industri pengolahan kakao berdampak negatif karena tingkat produktivitas perusahaan-perusahaannya tidak dapat

menggambarkan keunggulan kinerja dan efisiensi dari perusahaan tersebut.

- Hambatan eksternal dari industri ini adalah disparitas harga biji kakao akibat harga biji kakao luar negeri yang jauh lebih tinggi daripada harga biji kakao dalam negeri. Hal ini mengakibatkan industri pengolahan kakao dalam negeri kekurangan bahan baku karena para pedagang lebih suka menjual biji kakao Indonesia keluar negeri. Penelitian ini membuktikan disparitas harga biji kakao berpengaruh negatif terhadap probabilitas perusahaan pengolahan kakao bertahan dalam industri, walaupun signifikansi variabel terjadi hanya pada beberapa periode penelitian.

Dari analisa jangka waktu pendek maupun jangka waktu panjang faktor terbesar yang mempengaruhi keberadaan perusahaan adalah ukuran perusahaan dibandingkan dengan umur perusahaan. Kemudian PPN dan produktifitas memberikan dampak yang besar terhadap probabilitas perusahaan tutup/mati.

Penelitian ini juga mendapati temuan bahwa dalam analisa satu tahun/jangka pendek, signifikansi dari variabel-variabel bebas rendah (pada *significant level* 10%). Akan tetapi arah koefisien variabel konsisten pada tiap periodenya dan sebagian besar sesuai dengan hipotesa awal. Rendahnya signifikansi variabel-variabel bebas ini diduga karena jumlah observasi yang terlalu sedikit pada analisa satu tahun/jangka pendek, sehingga signifikansi variabel rendah/ tidak signifikan.

6.2 Saran untuk Penelitian Selanjutnya dan Pemerintah

Dari hasil analisis dan kesimpulan yang diperoleh melalui penelitian ini, penulis ingin menyampaikan saran untuk penelitian selanjutnya pada industri kakao pada umumnya dan industri pengolahan kakao pada khususnya.

Akibat keterbatasan waktu dan data, penulis tidak dapat membentuk model yang lebih komprehensif terhadap permasalahan pada industri pengolahan kakao. Salah satunya permasalahan kebijakan tarif Indonesia yang rendah terhadap produk olahan dari luar negeri dibandingkan tingkat tarif negara lain, juga ikut menyumbang tidak berkembangnya industri pengolahan kakao Indonesia pada

periode tersebut. Hal ini pernah diteliti dalam jurnal luar negeri oleh Brander (1995) dan Baggs (2004), yang meneliti tentang *firm survival* terhadap perbedaan tarif antara US dan Canada.

Pemerintah pada Januari 2007 telah menghapuskan kebijakan PPN 10% terhadap biji kakao, dan sejak tahun 2006 tarif untuk produk olahan impor telah dinaikan dari 5% menjadi 15%. Hal ini kembali menyetatkan perkembangan industri pengolahan kakao Indonesia, akan tetapi pemerintah harus tetap menjaga dan memperbaiki iklim usaha industri kakao pada umumnya dan industri pengolahan kakao pada khususnya.

Pemberlakuan pajak ekspor komoditas kakao belum terlaksana sampai saat ini, kebijakan ini memberikan proteksi terhadap pasokan dalam negeri. ICCO sebagai organisasi kakao internasional telah memberikan rekomendasi tingkat pajak ekspor yang sesuai bagi negara-negara penghasil kakao terbesar di dunia, untuk Indonesia tingkat pajak yang disarankan oleh ICCO adalah 11 persen. Pemberlakuan kebijakan ini dipercaya dapat menjaga iklim usaha industri pengolahan kakao. Selain pajak ekspor pemerintah dapat juga memberlakukan *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk komoditas biji kakao akan keberlangsungan pasokan bahan baku bagi industri pengolahan kakao dapat terpenuhi dan berkelanjutan.

Informasi terkini pemerintah berencana menerapkan bea keluar untuk biji kakao²⁶, bentuk regulasi seperti ini hampir sama dengan pajak ekspor. Dengan kondisi sekarang ini ekspor biji kakao sangat besar keluar negeri terutama negara Malaysia, Singapura dan beberapa negara Eropa, mereka memiliki industri pengolahan kakao yang lebih berkembang dari Indonesia. Indonesia sebagai negara produsen kakao terbesar ketiga di dunia tertinggal dalam industri pengolahan. Sebagai contoh Ghana telah melakukan pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebesar 60 persen dari produksi nasional dan sisanya diekspor dengan bea keluar, kebijakan ini juga diharapkan dapat mendatangkan investasi kedalam negeri. Besaran bea keluar yang akan diterapkan oleh pemerintah masih dalam proses penghitungan, pemerintah dapat mempertimbangkan usulan dari ICCO untuk besaran pajak ekspor yang optimal sebesar 11 persen.

²⁶ Penerapan Bea Keluar Jangan Abaikan Petani, Kompas (Juni 2009).

Lebih lanjut dana dari bea keluar dapat disalurkan untuk program peningkatan produktifitas perkebunan rakyat, bantuan pembenihan, pembangunan infrastruktur, pemberantasan hama tanaman, dan pembangunan pusat penelitian kakao.

Pemerintah juga disarankan untuk menerapkan wajib Standart Nasional Indonesia (SNI) untuk biji kakao dan produk olahan kakao. Hal ini untuk menjaga kualitas produk dari Indonesia dan mencegah terjadinya pemotongan harga akibat mutu yang tidak sesuai dengan standart International.

Saran selanjutnya adalah melakukan pendekatan kepada pemerintah negara-negara tujuan ekspor produk olahan kakao Indonesia untuk menurunkan tarif bea masuk. Penurunan tarif bea masuk akan menyebabkan produk olahan kakao Indonesia lebih kompetitif.

